

## **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PENYIARAN DIGITAL RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) GORONTALO**

**Lisda Van Gobel**

**STIA Bina Taruna Gorontalo**

[lisdavangobel69@gmail.com](mailto:lisdavangobel69@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor penghambat implementasi penyiaran digital Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner/daftar pertanyaan, yang disebarkan kepada 89 (delapan puluh sembilan) responden Pegawai Negeri Sipil. Pengumpulan data lainnya melalui observasi dan dokumentasi untuk melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi analisis tabel, skor total rata-rata yang diperoleh dari hasil analisis adalah 3,22 kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersamaan, variabel sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana, sebagai faktor yang sangat menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital. Dalam arti, jika ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana tidak memadai di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) sangat menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital.

Disarankan, perlunya pengambil kebijakan di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI), memperhatikan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta sumber dana yang memadai.

**Kata Kunci: Implementasi, Penyiaran, Digital, RRI**

---

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mengantisipasi sistem penyiaran berteknologi tinggi, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI), mempersiapkan diri dengan menyediakan berbagai sumber daya teknologi. Hal tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2009, tentang penetapan

standar penyiaran "*Digital Audio Broadcasting (DAB) Family*" untuk penerapan radio digital di Indonesia. Teknologi tersebut menerapkan pita "*very high frequency (VHF)*".

Sebagai suatu kebijakan, implementasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Nomor 009/2005, tentang Kebijakan

Umum, Kebijakan Penyiaran dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan serta Sumber Daya.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) dalam aktivitasnya menerapkan standar sistem penyiaran publik yang didukung oleh sumber daya teknologi yang memadai. Melalui kebijakan tersebut, semua aktivitas layanan penyiaran menyesuaikan diri dan mengembangkan sumber daya dalam sistem teknologi komunikasi dan informasi. Sumber daya tersebut utamanya sumber daya manusia menyangkut kemampuan karyawan Radio Republik Indonesia (RRI), sumber daya sarana dan prasarana berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan, serta sumber daya dana yaitu penyediaan biaya operasional yang memadai.

Sumber daya tersebut sangat berperan dalam mensukseskan sistem penyiaran berteknologi tinggi. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut akan memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna siaran Radio Republik Indonesia (RRI) dimana saja berada. Dalam arti, kunci keberhasilan sistem penyiaran yang baik harus memperhatikan pengembangan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan siaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Bergulirnya reformasi di berbagai bidang, keberadaan komunikasi dan informasi sangat memegang peranan penting mengingat informasi-informasi aktual harus sesegera mungkin diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Siaran Radio Republik Indonesia (RRI) dalam menyajikan informasi menyangkut masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, maupun hiburan, harus dapat menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Selain itu, dalam penyiarannya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI), mengemban tugas melindungi masyarakat dari pembodohan dan kejahatan, menumbuhkan demokratisasi, dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak azasi manusia, melindungi anak-anak, remaja, kaum perempuan dan kelompok yang tidak diuntungkan serta menghormati privasi subyek dan obyek berita.

Konsekuensi tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) tersebut, di era reformasi saat ini merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam arti semakin maju dan modern suatu masyarakat, semakin membutuhkan informasi

yang cepat, tepat, dan akurat pada waktu yang dibutuhkan.

Sarana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI), adalah bagian dari teknologi komunikasi dan informasi yang efektif selain teknologi telekomunikasi lainnya. Bagi daerah yang tidak mengikuti dinamika perubahan, akan mengalami stagnan (berhenti ditempat). Keadaan demikian, menunjukkan tidak adanya gerakan yang membuat individu dan kelompok masyarakat daerah memiliki jati diri sebagai sumber daya potensial.

Demikian pula halnya yang terjadi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Gorontalo, berdasarkan pengamatan selama ini, ketertinggalan dalam mengikuti perubahan jaman lebih disebabkan ketidak siapan sumber daya manusianya, fasilitas pendukung antara lain peralatan dan perlengkapan penyiaran serta penyediaan anggaran operasional yang memadai. Ketiga faktor tersebut diduga sebagai faktor menghambat implementasi penyiaran sistem digital yang diterapkan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Gorontalo, dalam rangka menyediakan pelayanan yang berkualitas.

Disadari bahwa sumber daya manusia sebagai individu, memiliki potensi selain kelebihan juga kekurangan yang menjadi penggerak perubahan. Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Gorontalo, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Umumnya karyawannya hanya berlatar belakang pendidikan setingkat SLTA yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam mengimplementasikan sistem digital penyiaran. Demikian pula, ketersediaan peralatan dan perlengkapan teknis, serta biaya operasional yang digunakan untuk mendukung sistem digital dalam penyiaran belum memadai. Hal itu berakibat pada munculnya ketidakpuasan masyarakat pengguna pelayanan dalam sistem penyiaran yang berteknologi tinggi.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi penyiaran sistem digital Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo?

## **TUJUAN DAN MANFAAT**

### **PENELITIAN**

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor penghambat

implementasi penyiaran sistem digital Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo.

### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik khususnya dalam hal pengembangan organisasi mencapai tujuan. Di samping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki minat yang sama.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem penyiaran digital Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo untuk meningkatkan kualitas layanan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Hasil Penelitian

Variabel penelitian ini adalah faktor-faktor penghambat implementasi penyiaran digital terdiri dari, faktor sumber daya manusia (SDM), sarana dan

prasarana, dan sumber daya dana. Data yang dikumpulkan melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner, disebarkan kepada 89 (delapan puluh sembilan) responden, dianalisis menggunakan uji statistik sederhana tabel frekuensi dan uji tabel proporsi dimana hasilnya dikonfirmasi dengan shering 4,3,2,1 yaitu rentang skala yang dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sudjana,1997:116):

$$\text{Bobot tertinggi} : 4 \times 1 \times 89 = 356$$

$$\text{Bobot terendah} : 1 \times 1 \times 89 = 89$$

$$\text{Rentang Skala} : \frac{356 - 89}{4 - 1} = \frac{267}{3} = 89$$

$$\text{Rentang skala rata-rata} : \frac{89}{89} = 1$$

$$= 0,78$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut rentang skala rata-rata adalah 0,78. Untuk selanjutnya rentang skala rata-rata yang dijadikan pedoman dalam menentukan kategori dan kriteria hasil analisis, diuraikan pada tabel berikut ini.

### Rentang Skala Rata-Rata

Hasil Range	Kategori	Kriteria
3,15 – 3,93	Tinggi	Sangat menghambat
2,36 - 3,14	Sedang	Menghambat
	Rendah	Menghambat
	Sangat	t

1,57 - 2,35	Rendah	Kurang Menghamb at
0,78 - 1,56		Tidak menghambat

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu pegawai yang mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital memiliki kecakapan, ketangkasan, keterampilan, dan pengetahuan teknis.

Hasil analisis tentang kecakapan pegawai menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital, memperoleh skor 3,61 dalam kategori tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa, pegawai yang tidak memiliki kecakapan sangat menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital.

Dilihat dari persentase jawaban, 23,60 persen responden menjawab sangat menghambat pegawai yang tidak memiliki kecakapan, 29,21 persen responden menjawab menghambat, 31,46 persen responden yang menjawab kadang-kadang menghambat, 15,73 persen responden menjawab tidak menghambat, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak menghambat.

Hasil analisis tentang

ketangkasan pegawai menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital, memperoleh skor 2,17 dalam kategori rendah. Hal itu menunjukkan bahwa pegawai yang tidak memiliki ketangkasan kurang menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital.

Dilihat dari persentase jawaban, tidak ada responden menjawab sangat menghambat pegawai yang tidak memiliki ketangkasan, 13,48 persen responden menjawab menghambat, 22,47 persen responden yang menjawab kadang-kadang menghambat, 31,46 persen responden menjawab tidak menghambat, dan 32,59 persen responden yang menjawab sangat tidak menghambat.

Hasil analisis tentang keterampilan pegawai menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital, memperoleh skor 3,07 dalam kategori sedang. Hal itu menunjukkan bahwa pegawai yang tidak memiliki keterampilan menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital.

Dilihat dari persentase jawaban, 12,36 persen responden menjawab sangat menghambat pegawai yang tidak memiliki keterampilan, 19,10 persen responden menjawab menghambat, 38,20 persen responden yang menjawab kadang-kadang

menghambat, 24,72 persen responden menjawab tidak menghambat, dan 5,62 persen responden yang menjawab sangat tidak menghambat.

Hasil analisis tentang pengetahuan teknis pegawai menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital, memperoleh skor 3,57 dalam kategori tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa pegawai yang tidak memiliki pengetahuan teknis sangat menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital.

Dilihat dari persentase jawaban, 24,72 persen responden menjawab sangat menghambat pegawai yang tidak memiliki keterampilan, 30,34 persen responden menjawab menghambat, 26,97 persen responden yang menjawab kadang-kadang menghambat, 13,48 persen responden menjawab tidak menghambat, dan 4,49 persen responden yang menjawab sangat tidak menghambat.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu ketersediaan fasilitas kerja yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital terdiri dari, peralatan, perlengkapan, dan gedung.

Hasil analisis tentang fasilitas peralatan yang tidak memadai,

menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital, memperoleh skor 3,85 dalam kategori tinggi. Berarti fasilitas peralatan yang tidak memadai sangat menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban, 28,09 persen responden menjawab sangat menghambat fasilitas peralatan yang tidak memadai, 29,21 persen responden menjawab menghambat, 42,70 persen responden menjawab kadang-kadang menghambat, tidak ada responden menjawab tidak menghambat, dan sangat tidak menghambat.

Hasil analisis tentang fasilitas perlengkapan yang tidak memadai, menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital, memperoleh skor 3,10 dalam kategori sedang. Berarti fasilitas perlengkapan yang tidak memadai menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban, 21,35 persen responden menjawab sangat menghambat fasilitas perlengkapan yang tidak memadai, 21,35 persen responden menjawab menghambat, 33,71 persen responden menjawab kadang-kadang menghambat, 11,24 persen responden menjawab tidak menghambat, dan 16,85 persen sangat tidak menghambat.

Hasil analisis tentang fasilitas gedung yang tidak memadai,

menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital, memperoleh skor 3,55 dalam kategori tinggi. Berarti ketersediaan peralatan yang tidak memadai sangat menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital.

Dilihat dari persentase jawaban, 21,35 persen responden menjawab sangat menghambat ketersediaan peralatan yang tidak memadai, 24,71 persen responden menjawab menghambat, 41,57 persen responden menjawab kadang-kadang menghambat, 12,36 persen responden menjawab tidak menghambat, dan tidak ada responden menjawab sangat tidak menghambat.

### **3. Sumber Daya Dana**

Sumber dana yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sumber dana yang berasal dari anggaran internal, eksternal, dan bantuan lain yang tidak mengikat untuk membiayai operasional dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital.

Hasil analisis tentang sumber dana yang berasal dari anggaran internal yang tidak memadai, memperoleh skor 3,53 dalam kategori tinggi. Berarti sumber dana yang berasal dari anggaran internal yang tidak memadai sangat menghambat implementasi kebijakan

penyiaran digital.

Dilihat dari persentase jawaban, 28,09 persen responden menjawab sangat menghambat sumber dana yang berasal dari anggaran internal yang tidak memadai, 23,60 persen responden menjawab menghambat, 34,83 persen responden menjawab kadang-kadang menghambat, 13,48 persen responden menjawab tidak menghambat, dan tidak ada responden menjawab sangat tidak menghambat.

Hasil analisis tentang sumber dana yang berasal dari anggaran eksternal yang tidak memadai, memperoleh skor 2,99 dalam kategori sedang. Berarti sumber dana yang berasal dari anggaran eksternal yang tidak memadai menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital.

Dilihat dari persentase jawaban, 16,85 persen responden menjawab sangat menghambat sumber dana yang berasal dari anggaran eksternal yang tidak memadai, 12,36 persen responden menjawab menghambat, 34,83 persen responden menjawab kadang-kadang menghambat, 24,72 persen responden menjawab tidak menghambat, dan 11,24 persen responden menjawab sangat tidak menghambat.

Hasil analisis tentang sumber

dana yang berasal dari anggaran internal yang tidak memadai, memperoleh skor 2,66 dalam kategori sedang. Berarti sumber dana yang berasal dari anggaran bantuan yang tidak mengikat, menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital.

Dilihat dari persentase jawaban, tidak ada responden menjawab sangat menghambat sumber dana yang berasal dari anggaran bantuan yang tidak mengikat, 23,60 persen responden menjawab menghambat, 34,83

persen responden menjawab kadang-kadang menghambat, 25,84 persen responden menjawab tidak menghambat, dan 15,73 persen responden menjawab sangat tidak menghambat.

Analisis frekuensi dan persentase yang diuraikan diatas, sebagai gambaran atas jawaban responden terhadap indikator penelitian, yang kemudian direkapitulasi dengan memperoleh total skor rata-rata sebagai berikut:

#### Rekapitulasi Hasil Analisis Tabel

No	Pernyataan Responden	skor	Kategori
<b>Variabel Sumber Daya Manusia</b>			
1	Tentang pegawai yang tidak memiliki kecakapan	3,61	Tinggi
2.	Tentang pegawai yang tidak memiliki ketangkasan	2,17	Rendah
3.	Tentang pegawai yang tidak memiliki keterampilan	3,07	Sedang
4.	Tentang pegawai yang tidak memiliki pengetahuan teknis	3,57	Tinggi
	Skor rata-rata variabel	<b>3,11</b>	<b>Sedang</b>
<b>Variabel Sarana dan Prasarana</b>			
5.	Tentang fasilitas peralatan yang tidak memadai	3,85	Tinggi
6.	Tentang fasilitas perlengkapan tidak yang memadai	3,10	Sedang
7.	Tentang fasilitas gedung yang	3,55	Tinggi

	tidak memadai		
	Skor rata-rata variabel	<b>3,50</b>	<b>Tinggi</b>
<b>Variabel Sumber Dana</b>			
8.	Tentang sumber dana internal yang tidak memadai	3,53	Tinggi
9.	Tentang sumber dana eksternal yang tidak memadai	2,99	Sedang
10.	Tentang sumber dana bantuan lain yang tidak mengikat	2,66	Sedang
	Skor rata-rata variabel	<b>3,06</b>	<b>Sedang</b>
	Skor total rata-rata	<b>3,22</b>	<b>Tinggi</b>

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis tabel tersebut, skor total rata-rata yang diperoleh adalah 3,22 kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersamaan, variabel sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana, sebagai faktor yang sangat menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral dan mandiri, RRI memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam menegakkan nilai luhur yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, tentang Penyiaran melalui penyelenggaraan operasional siaran. Namun demikian, tugas dan tanggung jawab tersebut jika tidak didukung oleh fasilitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, sarana dan prasarana serta sumber dana yang memadai, maka RRI Gorontalo sebagai salah satu media elektronik, tidak akan mampu memberikan pelayanan yang

terbaik kepada pendengar di jazirah Gorontalo.

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis tabel yang ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, faktor sumber daya manusia yang dilihat dari kecakapan, ketangkasan, keterampilan, dan pengetahuan teknis, memperoleh skor rata-rata 3,11 dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tidak memiliki kecakapan, ketangkasan, keterampilan, dan pengetahuan teknis, menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Dari empat indikator yang digunakan dalam mengkaji masalah sumber daya manusia, pegawai yang

memiliki kecakapan dan pengetahuan teknis, memperoleh skor tertinggi, sedang keterampilan memperoleh skor sedang, dan ketangkasan memperoleh skor rendah. Berarti, dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital, kecakapan dan pengetahuan teknis sangat dibutuhkan. Sedang keterampilan, dan ketangkasan, dibutuhkan untuk kegiatan lainnya dalam penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo.

Faktor sarana dan prasarana yang dilihat dari ketersediaan fasilitas peralatan, perlengkapan, dan gedung, memperoleh skor rata-rata 3,50 dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana seperti peralatan, perlengkapan, dan gedung yang tidak memadai, sangat menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Hasil rekapitulasi tersebut, menunjukkan bahwa fasilitas peralatan dan gedung memiliki skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, kedua fasilitas tersebut sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan penyiaran digital. Sedang fasilitas perlengkapan, dibutuhkan untuk kegiatan lainnya dalam penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo.

Faktor sumber dana yang dilihat dari sumber dana yang berasal dari anggaran internal, eksternal, dan bantuan lain yang tidak mengikat, memperoleh skor rata-rata 3,06 kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana yang tidak memadai berasal dari anggaran internal, eksternal, dan bantuan lain yang tidak mengikat, menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Hasil rekapitulasi tersebut, menunjukkan bahwa sumber dana yang berasal dari anggaran internal memiliki skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam implementasi kebijakan penyiaran digital, Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo lebih mendahulukan sumber dana yang berasal dari anggaran internal organisasi. Sementara sumber dana yang berasal dari anggaran eksternal dan bantuan lain yang tidak mengikat, dibutuhkan pada kegiatan lainnya dalam penyiaran di Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor sumber daya manusia yang dilihat dari kecakapan, ketangkasan, keterampilan, dan pengetahuan teknis, memperoleh skor rata-rata 3,11 dalam kategori

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tidak memiliki kecakapan, ketangkasan, keterampilan, dan pengetahuan teknis, menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Dari empat indikator yang digunakan dalam mengkaji masalah sumber daya manusia, pegawai yang memiliki kecakapan dan pengetahuan teknis, memperoleh skor tertinggi, sedang keterampilan memperoleh skor sedang, dan ketangkasan memperoleh skor rendah. Berarti, dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital, kecakapan dan pengetahuan teknis sangat dibutuhkan. Sedang keterampilan, dan ketangkasan, dibutuhkan untuk kegiatan lainnya dalam penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo.

2. Faktor sarana dan prasarana yang dilihat dari ketersediaan fasilitas peralatan, perlengkapan, dan gedung, memperoleh skor rata-rata 3,50 dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana seperti peralatan, perlengkapan, dan gedung yang tidak memadai, sangat menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Hasil rekapitulasi tersebut, menunjukkan bahwa fasilitas peralatan dan gedung memiliki

skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, kedua fasilitas tersebut sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan penyiaran digital. Sedang fasilitas perlengkapan, dibutuhkan untuk kegiatan lainnya dalam penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo.

3. Faktor sumber dana yang dilihat dari sumber dana yang berasal dari anggaran internal, eksternal, dan bantuan lain yang tidak mengikat, memperoleh skor rata-rata 3,06 kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana yang tidak memadai berasal dari anggaran internal, eksternal, dan bantuan lain yang tidak mengikat, menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Hasil rekapitulasi tersebut, menunjukkan bahwa sumber dana yang berasal dari anggaran internal memiliki skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam implementasi kebijakan penyiaran digital, Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo lebih mendahulukan sumber dana yang berasal dari anggaran internal organisasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis tabel, skor total rata-rata yang diperoleh dari hasil analisis adalah 3,22 kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara

bersamaan, variabel sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana, sebagai faktor yang sangat menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital.

### SARAN

1. Perlunya pengambil kebijakan di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI), memperhatikan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kecakapan, ketangkasan, keterampilan, dan pengetahuan teknis.
2. Perlunya pengambil kebijakan di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI), memperhatikan sarana dan prasarana, berupa fasilitas peralatan, perlengkapan, dan gedung yang memadai.
3. Perlunya pengambil kebijakan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), memperhatikan ketersediaan sumber dana yang memadai berasal dari anggaran internal, eksternal, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faried. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Cet. Pertama,

Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian, Status Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI, Cet. Ketigabelas. Jakarta: Rineka Cipta

Darwin, Muhadjir dan Saiful Hidajat Djarot. 2003. *Teori Administrasi Negara*. Surabaya: Program MAP UNTAG.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Hasibuan, Melayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy M., Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kaho, Riwu Yose. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moenir. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.

- Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pembangunan Masyarakat.*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD.* Jakarta: Civil Education and Budget Transparency Advocation (Ciba) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S.P. 2001. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi.* Jakarta: Gunung Agung.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeprihanto, John. 2001. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan.* Edisi Pertama, Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPF.
- Solichin, Abdul Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara.* Edisi Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi.* Cet. Ke 12. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K. 2008. *Manajemen dan Organisasi dalam Realita Kehidupan.* Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktik.* Yogyakarta: BPF Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi.* Yogyakarta: Lukman Offset.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Edisi 1. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Wibawa, Samodra. 2002. *Laporan Penelitian Studi Implementasi Kebijakan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara.* Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori & Proses.* Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Media Presindo.

### **Undang-Undang dan Peraturan:**

Peraturan Menteri Komunikasi dan  
Informasi Nomor 21 Tahun  
2009 tentang Penerapan Radio  
Digital di Indonesia.

Surat Keputusan Dewan Pengawas  
Lembaga Penyiaran Publik  
(LPP) RRI Nomor 009/2005  
tentang Kebijakan umum,  
Kebijakan Penyiaran dan  
Kebijakan Pengembangan  
Kelembagaan dan Sumber  
Daya.